**BA B I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penjabaran tersebut tercermin dalam rumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah beserta indikator kinerja sasarannya yang dituangkan dalam perencanaan jangka menegah perangkat daerah sebagai Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes ini disusun bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Brebes. Seiring dengan Penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 maka Dokumen Renstra ini juga disusun. Oleh karena itu, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam Renstra perangkat daerah harus berpedoman pada tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam RPJMD. Rencana strategis ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes ini bukan merupakan dokumen yang berdiri sendiri, melainkan terkait langsung dengan dokumen yang diatasnya yaitu RPJMD, sedangkan RPJMD sendiri juga harus terkait dengan RPJPD. Selain itu, renstra ini juga terkait dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Secara singkat dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

* 1. **Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44321);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022;
17. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Penjabaran Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
    1. **Maksud dan Tujuan**
    2. **Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah adalah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes pada Tahun Anggaran 2017 – 2022.

* 1. **Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 adalah :

b.1 Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah Kabupaten Brebes selama periode Tahun 2017 – 2022.

b.2 Sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes selama Tahun Anggaran 2017 – 2022.

b.3 Sebagai instrumen penilaian kinerja dalam penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

**Bab I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes.

**Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN BREBES**

Memuat tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes.

**Bab III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program, telaahan renstra Kementerian / Lembaga terkait dan Renstra Perangkat Daerah Provinsiserta penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah.

**Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat pernyataan dan penjelasan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah untuk kurun waktu pembangunan lingkungan hidup 5 tahun ke depan.

**Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Diuraikan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

**Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menguraikan rencana program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan, disertai penjabaran indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif per tahun.

**Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Brebes.

**Bab VIII PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**DAN PENGELOLAAN SAMPAH KAB. BREBES**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.

Uraian tugas dan fungsi pejabat eselon dibawah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah, adalah sebagai berikut :

1. ***Sekretariat***

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah.

Dalam melaksanakan tugas – tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan,pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi,pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana,pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta pelaksanaan advokasi hukum,pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi, penyelenggaraan pengelolaan barang milik/asset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. ***Bidang Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkungan***

Bidang Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkungan yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan penaatan hukum lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Penataan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penaatan hukum lingkungan, Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, supervisi serta pengendalian perencanaan dan penaatan hukum lingkungan, Pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan penaatan hukum lingkungan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

1. ***Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran.***

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaa Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan secara terpadu, Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, supervisi, serta pengendalian bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidu, Pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

* + Sub Bagian Program dan Keuangan;
  + Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkungan, terdiri dari :

* + Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup;
  + Seksi Penaatan Lingkungan Hidup;
  + Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari :

* + Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
  + Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

e. KelompokJabatan Fungsional

f. Unit Pelaksana Teknis

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Struktur organisasi di bawah ini:

*Gambar 2.1*

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH**

**KABUPATEN BREBES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **KEPALA DINAS** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **SEKRETARIAT** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | | |  |  | Sub Bagian Keuangan dan Program | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN** | | | | |  |  |  |  | **BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup | | | |  |  |  |  |  | Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup | | | |  |  |  |  |  | Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UPTD | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Sumber Daya Perangkat Daerah**

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes didukung dengan keberadaan SDM dan sarana dan prasarana yang memadai.

**2.2.1.** **Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan data kepegawaian per November 2017 Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes didukung keberadaan 116 PNS daerah, 199 PTT dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 2.1.*

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | GOLONGAN RUANG | JUMLAH (ORANG) |
| 1 | IV / c | - |
| 2 | IV / b | 2 |
| 3 | IV / a | 1 |
| 4 | III / d | 7 |
| 5 | III / c | 5 |
| 6 | III / b | 4 |
| 7 | III / a | 1 |
| 8 | II / d | - |
| 9 | II / c | 12 |
| 10 | II / b | 10 |
| 11 | II / a | 48 |
| 12 | I / d | 2 |
| 13 | I / c | 19 |
| 14 | I / b | 5 |
| 15 | I / a | 1 |
| 16 | PTT | 199 |
|  | TOTAL | 315 |

*Tabel 2.2.*

**Data Pegawai Menurut Pendidikan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH (ORANG) |
| **PNS** | | |
| 1 | S2 (Pasca Sarjana) | 2 |
| 2 | S1 (Sarjana) | 12 |
| 3 | Diploma IV | 1 |
| 4 | Diploma III | - |
| 5 | Diploma II | - |
| 6 | Diploma I | - |
| 7 | SLTA | 74 |
| 8 | SLTP | 15 |
| 9 | SD | 12 |
|  | Jumlah PNS | 116 |
| **PTT** | | |
| 1 | S2 (Pasca Sarjana) | - |
| 2 | S1 (Sarjana) | 2 |
| 3 | Diploma IV | - |
| 4 | Diploma III | 1 |
| 5 | Diploma II | - |
| 6 | Diploma I | - |
| 7 | SLTA | 133 |
| 8 | SLTP | 50 |
| 9 | SD | 13 |
|  | Jumlah PTT | 199 |

**2.2.2. Sarana Prasarana**

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.3.*

**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)**

**PER 31 DESEMBER TAHUN 2017**

NO. KODE LOKASI :12.11.09.20.05

| **No. Urut** | **Gol** | **Kode Bidang Barang** | **Nama Bidang Barang** | **Jml Barang per 31 Des 2017** | **Jumlah per 31 Des 2016 (Rp.)** | **Penambahan Tahun 2017 (Rp.)** | **Jumlah Harga per 31 Des 2017 (Rp.)** | **Akumulasi Penyusutan s.d 2017** | **Nilai Bersih** | **Kondisi**  **B/RR/RB** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | 01 | **A** | **TANAH** | **3** | **29.821.000** | **0** | **0** | **0** | **29.821.600** |  |
|  |  |  | Tanah | 3 | 29.821.600 | 0 | 0 | 0 | 29.821.600 | B |
| 2 | 02 | **B** | **PERALATAN DAN MESIN** | **1.270** | **12.171.159.450** | **1.374.697.000** | **13.522.175.450** | **8.991.684.876** | **4.530.490.574** |  |
|  |  |  | 1. Alat besar 2. Alat angkutan 3. Alat bengkel 4. Alat pertanian dan peternakan 5. Alat kantor dan rumah tangga 6. Alat studio dan komunikasi 7. Alat ukur 8. Alat kedokteran 9. Alat laboratorium 10. Alat kemananan | 23  241  0  7  691  6  202  0  100  0  0 | 6.377.170.250  4.383.558.500  0  73.000.000  772.557.500  41.791.800  0  0  523.081.400  0  0 | 0  787.210.000  0  21.965.000  201.941.000  194.500.000  72.822.000  0  72.578.000  0  0 | 6.377.170.250  5.170.768.500  0  94.965.000  974.498.500  236.291.800  72.822.000  0  595.659.400  0  0 | 4.637.636.875  3.157.868.429  0  60.241.250  544.140.200  74.991.800  14.564.400  0  502.241.922  0  0 | 1.739.533.375  2.012.900.071  0  34.723.750  430.358.300  161.300.000  58.257.600  0  93.417.478  0  0 | RB  RB  -  -  RB  RB  RB  -  B  -  - |
| 3 | 03 | **C** | **GEDUNG DAN BANGUNAN** | **85** | **18.855.464.330** | **1.096.652.000** | **13.522.175.450** | **3.022.159.999** | **16.929.956.331** |  |
|  |  |  | 1. Bangunan gedung 2. Bangunan monument | 22  63 | 5.899.251.500  12.956.212.830 | 372.690.000  723.962.000 | 6.271.941.500  13.680.174.830 | 524.068.061  2.498.091.938 | 5.747.873.439  11.182.082.892 | B  RB |
| 4 | 04 | **D** | **JALAN IRIGASI DAN JARINGAN** | **55** | **10.770.616.100** | **1.096.652.000** | **11.077.616.100** | **6.958.033.900** | **4.121.582.200** |  |
|  |  |  | 1. Jalan dan jembatan 2. Bangunan air (irigasi) 3. Instalasi 4. Jaringan | 2  21  32  0 | 1.451.331.000  202.852.000  9.116.433.100  0 | 0  0  307.000.000  0 | 1.451.331.000  202.852.000  9.423.433.100  0 | 1.327.019.500  10.142.600  5.618.871.800  0 | 124.311.500  192.709.400  3.804.561.300  0 | -  RB  RB  - |
| 5 | 05 | **E** | **ASET TETAP LAINNYA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  | 1. Buku dan perpustakaan 2. Barang bercorak kesenian/kebudayaan 3. Hewan/ternak dan tumbuhan | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |  |
| 6 | 06 | **F** | **KONSTRUKSI DALAM PENYELESAIAN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  | Kontruksi dalam pengerjaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | **JUMLAH** | **1.413** | **41.827.061.480** | **2.754.668.000** | **44.581.729.480** | **18.969.878.774** | **25.611.850.706** |  |

Dengan tercukupinya sarana prasarana tersebut, sejauh ini kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan dan pengelolaan sampah masih dapat diselesaikan. Salah satu contoh pelayanan yang berlangsung dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes adalah pelayanan perijinan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) dan UKL UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Pada Tahun 2016 terdapat 86 SPPL dan 45 UKL UPL. Selain itu terdapat pula pelayanan perijinan perijinan pembuangan air limbah, perijinan TPS limbah B3, perijinan pemakaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perijinan tebang pohon serta pengelolaan sampah.

**2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tingkat capaian kinerja yang bisa disampaikan adalah tingkat kinerja Kantor Lingkungan Hidup (Tahun 2012-2016) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (Tahun 2017) yang secara umum berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2012-2017 sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan, walaupun masih ada beberapa target yang belum tercapai dengan maksimal.

Pengelolaan sampah dilakukan melalui program penyediaan sarana prasarana persampahan yang salah satu keluarannya adalah pengadaan jembatan timbang serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Indikator yang digunakan adalah prosentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti dan prosentase usaha formal yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan. Realisasi dari indikator prosentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti adalah 100% sedangkan untuk realisasi dari indikator prosentase usaha formal yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan adalah 100%.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup tidak lepas dari pengelolaan ruang terbuka hijau publik yang dalam hal ini dilakukan melalui program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4.

*Tabel 2.4.*

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

**Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1. | Prosentase pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) |  |  |  | 0 | 60 | 80 | 100 | 100 | 0 | 60 | 80 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Prosentase pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%) |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Prosentase pengolahan sampah berbasis masyarakat perkotaan (%) |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Prosentase luas lahan yang telah diketahui informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) |  |  |  | 0 | 30 | 60 | 80 | 100 | 0 | 30 | 60 | 51 | 100 | 0 | 100 | 100 | 62,96 | 100 |
| 5. | Prosentase pelayanan pencegahan pencemaran air (%) |  |  |  | 0 | 30 | 60 | 80 | 100 | 0 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Luas lahan kritis di daerah tangkapan air dan sumber air serta daerah rawan longsor yang tertanami pohon (Ha) |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah :

1. Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat;
2. Populasi penduduk yang semakin bertambah sehingga mempengaruhi kebutuhan ruang terbuka hijau, air bersih sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam;
3. Semakin berkembangnya kegiatan usaha – kegiatan usaha baik skala kecil, menengah maupun besar ;
4. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah;
5. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan;
6. Pengawasan terkait izin lingkungan masih belum berjalan secara optimal.

Tantangan SKPD sesuai dengan isu strategis di KLH, antara lain :

1. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik
2. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air

Adapun peluang pengembangan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Tersedianya instrument dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, SPM Bidang Lingkungan Hidup, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklim), Bank Sampah, dan sebagainya;
3. Adanya dukungan kerjasama dari masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah baik propinsi maupun pusat serta instansi lain yang terkait;
4. Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan CSR *(Corporate Social Responsibility).*

*Tabel 2.5..*

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

**Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes**

| Uraian  Program / Kegiatan | Anggaran pada Tahun ke-  (Rp.) Ribu | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke-  (Rp.) Ribu | | | | | | Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun ke- (%) | | | | | | Rata – rata Pertumbuhan | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Anggaran | | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | | (18) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **275.656** | **660.984** | **417.840** | **662.880** | **844.650** | **221.840,52** | **537.309,55** | **411.277,663** | **549.410,952** | **765.210,6** | **80,48** | | **81,29** | **98,43** | **82,88** | **90,59** |  | |  |
| Penyediaan jasa surat menyurat | 3.000 | 332.492 | 5.150 | 15.000 | 10.500 | 2.093,45 | 270.364,559 | 4.151,14 | 7.914,81 | 10.473,6 | 69,78 | | 81,31 | 80,60 | 52,28 | 99,75 |  | |  |
| Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 42.622 | 45.000 | 52.860 | 76.400 | 104.700 | 30.108,779 | 36.587,942 | 46.123,296 | 54.863,14 | 61.265,5 | 70,64 | | 81,31 | 87,26 | 71,18 | 58,52 |  | |  |
| Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 6.015 | 10.000 | 15.790 | 12.720 | 27.200 | 2.085 | 7.833,4 | 12.012 | 12.718 | 16.295 | 34,67 | | 78,33 | 76,07 | 99,99 | 59,91 |  | |  |
| Penyediaan alat tulis kantor | 12.000 | 14.539 | 20.000 | 40.000 | 65.000 | 9.273 | 14.177,4 | 20.000 | 39.998,5 | 60.704 | 77,28 | | 97,51 | 100 | 99,99 | 93,39 |  | |  |
| Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | 12.910 | 15.000 | 19.290 | 15.705 | 22.647 | 11.638,8 | 14.668,15 | 19.230,95 | 14.798,5 | 22.561 | 90,15 | | 97,79 | 99,67 | 94,23 | 99,62 |  | |  |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 2.500 | 17.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 1.451,2 | 16.181,8 | 2.996,5 | 4.569 | 3.000 | 58,05 | | 95,18 | 99,88 | 91,38 | 100 |  | |  |
| Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 46.119 | 30.477 | 38.600 | 69.000 | 155.500 | 30.802 | 29.220,775 | 38.515,9 | 65.950 | 141.532,5 | 66,79 | | 95,88 | 99,78 | 95,58 | 91,02 |  | |  |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 7.620 | 7.056 | 10.200 | 12.000 | 20.208 | 6.880 | 6.617 | 8.160 | 9.826 | 19.552 | 90,29 | | 93,78 | 80 | 81,88 | 96,75 |  | |  |
| Penyediaan makanan dan minuman | 18.870 | 9.420 | 11.710 | 17.055 | 27.453 | 7.624,3 | 6.099,6 | 11.030 | 10.488,5 | 22.510 | 40,40 | | 64,75 | 94,19 | 61,5 | 81,99 |  | |  |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 104.000 | 130.000 | 150.965 | 200.000 | 250.000 | 101.204,986 | 107.226,706 | 148.857,485 | 188.955,095 | 249.851 | 97,31 | | 82,48 | 98,60 | 94,48 | 99,94 |  | |  |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah | 20.000 | 50.000 | 100.275 | 200.000 | 158.442 | 18.679 | 28.332,216 | 100.191,392 | 139.329,407 | 157.466 | 93,40 | | 56,66 | 99,92 | 69,66 | 99,38 |  | |  |
| **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **173.464** | **200.000** | **178.050** | **387.400** | **487.270** | **130.341,56** | **180.916,75** | **150.740,283** | **357.853,194** | **425.749** | **75,14** | | **90,46** | **84,47** | **92,37** | **87,37** |  | |  |
| Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 94.267 | 120.000 | 85.000 | 91.400 | 159.750 | 89.099 | 109.488 | 80.710 | 83.230 | 119.500 | 94,52 | | 91,24 | 94,95 | 91,06 | 74,80 |  | |  |
| Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional | 79.197 | 80.000 | 93.050 | 98.100 | 127.470 | 41.242,555 | 71.428,75 | 70.030,283 | 79.913,914 | 107.199 | 52,08 | | 89,29 | 75,26 | 81,46 | 84,10 |  | |  |
| Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 197.900 | 200.050 | 0 | 0 | 0 | 194.710 | 199.050 | 0 | | 0 | 0 | 98,39 | 99,50 |  | |  |
| **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **0** | **0** | **5.000** | **7.700** | **12.000** | **0** | **0** | **5.000** | **7.700** | **10.000** | **0** | | **0** | **100** | **100** | **83,33** |  | |  |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 0 | 0 | 5.000 | 7.700 | 12.000 | 0 | 0 | 5.000 | 7.700 | 10.000 | 0 | | 0 | 100 | 100 | 83,33 |  | |  |
| **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** | **1.979.915** | **1.416.250** | **117.023** | **2.486.500** | **6.975.175** | **1.829.609** | **1.282.445,55** | **113.399,940** | **2.414.080,996** | **6.354.505** | **92,41** | | **90,55** | **96,90** | **97,08** | **91,10** |  | |  |
| Penyediaan prasarana & sarana pengl persampahan | 383.273 | 0 | 0 | 1.359.500 | 6.398.575 | 352.100 | 0 | 0 | 1.304.865,416 | 5.793.005 | 91,87 | | 0 | 0 | 95,98 | 90,54 |  | |  |
| Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK) | 1.596.642 | 926.250 | 0 | 1.127.000 | 376.600 | 1.477.509 | 879.280 | 0 | 1.109.215,58 | 367.000 | 92,54 | | 94,93 | 0 | 98,42 | 97,45 |  | |  |
| Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DBHCHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 97,25 |  | |  |
| Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | 0 | 490.000 | 117.032 | 0 | 0 | 0 | 403.165,55 | 113.399,940 | 0 | 0 | 0 | | 82,28 | 96,90 |  |  |  | |  |
| **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup** | **55.000** | **249.500** | **2.136.980** | **322.320** | **677.255** | **14.698,8** | **212.276,54** | **2.021.707,632** | **310.514,014** | **631.843** | **26,73** | | **85,08** | **94,60** | **96,34** | **93,29** |  | |  |
| Pemantauan kualitas lingkungan | 55.000 | 200.000 | 571.190 | 247.320 | 487.255 | 14.698,8 | 174.646,535 | 562.272,570 | 239.717,014 | 460.008 | 26,73 | | 87,32 | 98,44 | 96,92 | 94,41 |  | |  |
| Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Pengendalian Lingkungan Hidup | 0 | 49.500 | 1.565.790 | 75.000 | 190.000 | 0 | 37.630 | 1.459.435,062 | 70.797 | 171.835 | 0 | | 76,02 | 93,21 | 94,40 | 90,44 |  | |  |
| **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam** | **18.001** | **361.700** | **381.150** | **1.758.741** | **403.150** | **0** | **349.081,4** | **378.520** | **1.684.521,6** | **399.386** | **0** | | **96,51** | **99,31** | **95,78** | **99,07** |  | |  |
| Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air | 18.001 | 0 | 0 | 826.900 | 252.100 | 0 | 0 | 0 | 794.611,6 | 249.236 | 0 | | 0 | 0 | 96,10 | 98,86 |  | |  |
| Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air (DAK) | 0 | 361.700 | 0 | 926.830 | 0 | 0 | 349.081,4 | 0 | 884.900 | 0 | 0 | | 96,51 | 0 | 95,48 | 0 |  | |  |
| Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air (DAK 2015) | 0 | 0 | 0 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.554,545 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 99,99 | 0 |  | |  |
| Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air (pendamping DAK 2015) | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,455 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 99,88 | 0 |  | |  |
| Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.150 | 0 | | 0 | 0 |  | 99,40 |  | |  |
| Pantai dan laut lestari |  |  | 181.150 |  |  |  |  | 179.760 |  |  |  | |  | 99,23 |  |  |  | |  |
| Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA |  |  | 200.000 |  |  |  |  | 196.760 |  |  |  | |  | 98,38 |  |  |  | |  |
| **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau** | **0** | **841.772** | **210.000** | **0** | **1.423.850** | **0** | **653.196,5** | **208.620** | **0** | **1.384.744** | **0** | | **77,60** | **99,34** |  | **97,25** |  | |  |
| Penataan RTH | 0 | 415.250  253.058 | 12.000 | 0 | 1.023.850 |  | 400.138,5  253.058 | 12.000 | 0 | 985.744 | 0 | | 96,36  100 | 100 |  | 96,28 |  | |  |
| Penataan RTH (DBHCHT) | 0 | 0 | 198.000  (DAK) | 0 | 400.000 |  | 0 | 196.620 | 0 | 399.000 | 0 | | 0 | 99,30 |  | 99,75 |  | |  |

Dilihat dari Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Periode Tahun 2012-2017, pertumbuhan anggaran umumnya tidak terlalu besar. Pertumbuhan cukup signifikan terlihat pada kegiatan – kegiatan yang telah diselenggarakan. Dari tabel 2.5. tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai target.

Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengeloaan Sampah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada periode 2013-2016 tersebut perlu dipelajari dan dianalisa agar bisa dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan periode berikutnya.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, faktor – faktor SWOT yang dapat diidentifikasi pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, adalah :

* 1. KEKUATAN *(Strengths)*:

Merupakan segala sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, ketrampilan, soft skill, maupun keunggulan lain yang dimiliki organisasi . Beberapa kekuatan yang dimiliki Dinas Lingkuingan Hidup dan Pengelolaan Sampah, antara lain:

* + - 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung yaitu kendaraan operasional dan sarana prasarana/peralatan kantor;
      2. Adanya kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah;
      3. Tersedianya dukungan anggaran antara lain dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan APBD.

1. KELEMAHAN *(Weaknesses):*

Merupakan suatu keterbatasan serta kekurangan dalam organisasi yang menghambat kinerja organisasi. Beberapa kelemahan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes, antara lain:

* 1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah masih belum mencukupi;
  2. Belum optimalnya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan;
  3. Kompetensi tenaga / sumber daya manusia belum sesuai kualifikasi pekerjaan;

1. PELUANG *(Opportunities)*

Merupakan suatu kesempatan yang sangat penting yang sangat ditunggu organisasi, beberapa peluang yang dimiliki Dinas Lingkungan Hiudp dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes, antara lain:

* 1. Kesempatan Pengembangan dan pemanfaatan Iptek;
  2. Adanya prioritas pembangunan di bidang lingkungan hidup dan pengeluaran sampah dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

1. ANCAMAN *(Threats)*

Merupakan situasi penting dari luar yang tidak menguntungkan organisasi sehingga menganggu kinerja organisasi. Beberapa ancaman yang menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, antara lain:

* + - 1. Tingginya tuntutan pelayanan prima di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
      2. Banyaknya pantauan dari berbagai LSM;

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes disusun dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan strategis dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil dan kinerja yang telah dicapai selama ini dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan strategis yang disusun dapat bersinergi dan memberikan kontribusi yang besar dalam pemecahan permasalahan pembangunan di Kabupaten Brebes.

Selanjutnya permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes sebagai perumusan kebijakan dan program serta kegiatan untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung, daerah tangkapan air dan sumber mata air serta penanganan wilawah rawan longsor;
2. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan sampah, hal ini terlihat dari cakupan penanganan sampah yang masih sangat kecil;
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle);
4. Tingginya alih fungsi lahan dan penurunan kawasan hutan;
5. Menurunnya kualitas dan kuantitas air baku;
6. Meningkatnya bencana terkait perubahan iklim;
7. Buruknya sanitasi permukiman;
8. Meningkatnya pencemaran udara, air dan tanah;
9. Belum memadainya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup;
10. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di laboratorium lingkungan hidup;
11. Meningkatnya pencemaran air yang disebabkan oleh usaha/kegiatan industri/domestik rumah tangga;
12. Minimnya data dan informasi lingkungan hidup yang mudah diakses masyarakat;
13. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran serta partisipatif aktif masyarakat terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup;
    1. **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Brebes maka Visi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022, adalah :

***“MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”***

Dari Visi tersebut dijabarkan melalui misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai – nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan local;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang professional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah adalah pernyataan misi ke – 2. Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah, dengan indikator tujuan adalah cakupan pelayanan infrastuktur wilayah.
2. Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Arah kebijakan yang diambil adalah pemantapan serta perkuatan infrastruktur wilayah dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas air, meningkatnya kualitas udara, dan meningkatnya tutupan lahan.

Isu strategis lingkungan hidup adalah :

1. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Dalam rangka menjaga keberlanjutan sumberdaya alam sebagai suplai perekonomian daerah, maka penting untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup ke depan. Selain itu, dengan menjaga sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang baik, dapat mengurangi risiko bencana alam, yang dapat berdampak pada munculnya kemiskinan baru.

1. Pembangunan infrastuktur

Infrastuktur masih menjadi isu strategis yang perlu untuk diselesaikan, guna mendukung stabilitas perekonomian daerah, dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan pemerataan pembangunan.

Sebagai bentuk penjabaran dari isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Isu Ruang Terbuka Hijau, sampah dan limbah

Isu strategis lingkungan hidup adalah sebagaimana mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim di Kabupaten Brebes. Peningkatan kepadatan bangunan akibat pertambahan penduduk berimplikasi pada berkurangnya daerah – daerah resapan air dan krisis air tanah. Masalah eksploitasi energi, mengakibatkan pemanasan global, dan perubahan iklim global.

Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi persyaratan ekologis, sosial dan ekonomi, menjadi isu strategis karena merupakan upaya perlindungan konservasi sumber daya alam, aktivitas interaksi sosial dan ekonomi. Ruang Terbuka Hijau di beberapa wilayah juga akan menyerap emisi gas kendaraan bermotor dan sebagai resapan air akibat curah hujan di musim kemarau.

Isu strategis persampahan adalah bagaimana mewujudkan pengurangan sampah menuju TPA sampai mencapai konsep Zero Waste. Tantangan yang mendesak diselesaikan antara lain :

1. Pemenuhan rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan jumlah penduduk;
2. Penanganan TPA yang efektif;
3. Pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal dilakukan di kawasan – kawasan permukiman;
4. Program Kampung Iklim dan program pro lingkungan seperti car free day setiap hari Minggu.
5. Isu industri kreatif

Mengembangkan kelompok kreasi usaha rumah tangga menghasilkan karya dari program pengelolaan sampah berbasis 3R untuk menambah penghasilan keluarga dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

1. Isu regulasi lingkungan

Perlu penegasan implementasi kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban dan kebijakan pro lingkungan yang berkelanjutan.

1. Isu lingkungan bidang sosial dan budaya

Membudayakan perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan tertib mendukung lingkungan sehat.

* 1. **Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional bidang lingkungan hidup :

Visi :**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** |
| 1. | Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5 |
| 2. | Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. | Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. |

* 1. **Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.**

| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan Umum** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah UMKM, industri menengah besar, ADIPURA, Penanganan Kasus Lingkungan, Kualitas Dokumen AMDAL dan Kualitas Laboratorium Lingkungan | Pelaksanaan PROPER, ADIPURA, Pengelolaan B3, Fasilitasi bangunan biodegester, Pengitungan daya dukung dan daya tampung, Penanganan kasus lingkungan hidup serta Penilaian dokumen AMDAL yang dinilai oleh Tim Komisi AMDAL dan Peningkatan Kualitas Laboratorium Lingkungan | Menurunkan tingkat pencemaran dari industri menengah/besar dan industri kecil, Pelaksanaan SPM Lingkungan Hidup, Pelaksanaan ADIPURA dan Penilaian Dokumen AMDAL serta peningkatan Kualitas Laboratorium Lingkungan |
| Meningkatkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Bencana, Kelestarian Ekosistem serta Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng | Meningkatnya penanganan kerusakan di wilayah pesisir, Informasi Status Mutu Udara Ambien dan Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng | Pengkayaan tanaman penghijauan pantai; Pembangunan pencegah abrasi/erosi/ sabuk pantai, Pemantauan kualitas udara ambien dan Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng | Penanganan kerusakan pesisir akibat abrasi/erosi pantai, Pemantauan kualitas udara ambien (SPM lingkungan hidup) dan Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng |
| Meningkatkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Bencana, Kelestarian Ekosistem serta Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng | Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau/RTH Perkotaan | Pengkayaan tanaman pada Ruang Terbuka Hijau perkotaan | Ruang Terbuka Hijau/RTH Perkotaan |
|
| Meningkatkan upaya pengendalian kerusakan lingkungan dan pelestarian ekosistem melalui konservasi | Meningkatnya penanganan lahan kritis kawasan lindung di luar kawasan hutan | Peningkatan jumlah bibit tanaman konservasi di kawasan kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan; Pengkayaan tanaman langka/lokal; Pembangunan bangunan konservasi sipil teknis | Penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan |
|
|
|
| Meningkatkan Kemitraan Bersama Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya, Ketrampilan dan Kemandirian | Meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan hidup | Pembinaan sekolah peserta adiwiyata; Pelatihan/pembelajaran kader lingkungan; Perencanaan dan Monev PLH; Peringatan Hari Lingkungan Hidup, Agro Expo dan Gelar Teknologi Lingkungan | Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata); Pelatihan/Pembelajaran bagi Kader Lingkungan; Perencanaan dan Monev PLH; Peringatan Hari Lingkungan Hidup, Agro Expo dan Gelar Teknologi Lingkungan |

* 1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Straategis (KLHS)**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaen Brebes 2010-2030 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 yang berisi arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Brebes. Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi :

1. **Kebijakan pengembangan kawasan lindung**

Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung meliputi:

* Peningkatan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya;
* Peningkatan kualitas perlindungan kawasan lereng Gunung Slamet, lahan-lahan yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) dan kawasan rawan longsor dan erosi;
* Pengurangan pemanfaatan lahan-lahan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya.

Sedangkan strategi penetapan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya meliputi menetapkan definiasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya dan menetapkan dan mempertahankan luas serta lokasi kawasan masing-masing kawasan lindung.

Strategi peningkatkan kualitas perlindungan kawasan lereng Gunung Slamet, lahan -lahan yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) dan kawasan rawan longsor atau erosi meliputi :

a. Melakukan reboisasi lereng Gunung Slamet di Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Paguyangan;

b. Melakukan reboisasi lahan-lahan yang berkelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) di Kecamatan Salem, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Paguyangan;

c. Melakukan penghijaun lahan-lahan rawan longsor dan erosi di Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Paguyangan.

Strategi pengurangan pemanfaatan lahan-lahan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya meliputi:

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung;

b. Memindahkan secara bertahap permukiman yang terletak di kawasan rawan bencana longsor;

c. Mengembangkan budidaya pertanian yang dibarengi penanaman keras pada lahan - lahan kawasan lindung yang dimiliki masyarakat.

1. **Kebijakan pengembangan kawasan budidaya.**

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi:

a. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;

b. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;

c. Pengembangan komoditas pertanian, perikanan, dan jasa pemasaran.

Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:

a. Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;

b. Mengembangkan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara efisien dan kompak;

c. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;

d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup adalah rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan yang meliputi rencana sistem prasarana pengelolaan persampahan, rencana sistem prasarana air limbah dan rencana sistem prasarana drainase.

Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Persampahan terdiri atas:

a. Tempat pemrosesan akhir regional;

b. Tempat pemrosesan akhir (TPA);

c. Tempat penampungan sementara (TPS); dan

d. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.

Sedangkan lokasi TPA sampah di Kabupaten Brebes adalah:

a. TPA Regional Rawabaju di Kecamatan Songgom;

b. TPA Kaliwlingi di Kecamatan Brebes;

c. TPA Kubangwungu di Kecamatan Ketanggungan; dan

d. TPA Kalijurang di Kecamatan Tonjong.

Rencana Lokasi TPS sampah ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal dalam sistem penampungan sampah sementara, terutama pada kawasan sekitar pasar pada setiap ibukota kecamatan. Sedangkan rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga dilakukan dengan meningkatkan partisipasi setiap rumah tangga untuk membantu mengurangi sampah mulai dari sumbernya.

Rencana sistem prasarana air limbah meliputi :

a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah dan bahan beracun berbahaya (B3);

b. Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;

c. Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC umum terminal, pasar, lokasi sanimas dan rumah tangga perkotaan;

d. Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.

Pembangunan instalasi pengolahan limbah dan bahan beracun berbahaya meliputi:

a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah yang mampu mengolah limbah rata-rata 600 l/det;

b. Instalasi yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang memadai untuk mengelola limbah B3.

c. Rencana pengelolaan limbah ini meliputi pada Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Bumiayu, dan kawasan ibukota kecamatan lain yang berkembang menjadi kawasan perkotaan.

Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah industri meliputi:

a. Pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri, lokasi peruntukan industri yang telah berkembang dan lokasi kegiatan industri besar, industri menengah, industri kecil, industri rumah tangga;

b. Pembangunan instalasi ini menjadi tanggungjawab pengusaha yang melakukan kegiatan industri;

c. Pemantauan yang ketat kepada perusahaan industri yang melakukan pencemaran dengan limbahnya;

d. Guna mengurangi dampak negatif kegiatan industri, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembangunan instalasi, khususnya bagi industri rumah tangga.

* 1. **Penentuan Isu – isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah, telaah terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 – 2022 serta telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun 2011 – 2030 maka ditentukan isu – isu strategis yang mendasari arah perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah yaitu :

1. Menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya kejadian bencana akibat perubahan iklim;
2. Berkurangnya jumlah mata air, kapasitas daerah-daerah resapan air dan daerah aliran sungai;
3. Menurunnya daya dukung air;
4. Belum terpenuhinya ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan;
5. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
6. Belum optimalnya upaya pemulihan lahan kritis;
7. Belum adanya database lingkungan hidup dan pengelolaan sampah yang lengkap dan berkelanjutan;
8. Lemahnya pemahaman tentang tanggung jawab pengelolaan sampah.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

* 1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2017-2022). Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagaimana berikut :

*Tabel 4.1.*

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kab. Brebes**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR  TUJUAN / SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE - | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatnya kualitas air |  | Indeks Kualitas Air | 42.3 | 43.6 | 45 | 46.3 | 47.6 | 49 |
| 2 | Meningkatnya kualitas udara |  | Indeks Kualias Udara | 79.2 | 80.5 | 81.8 | 83.1 | 84.4 | 85.7 |
| 3 | Meningkatnya tutupan lahan |  | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 |
|  |  | Menurunnya pencemaran air | Persentase penurunan indicator pencemaran air (BOD, COD, TSS, TDS) % | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
|  |  | Menurunnya pencemaran udara | Persentase penurunan Hidro Carbon (HC) pada udara ambient % | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |
|  |  | Pengurangan lahan kritis | Luas lahan kritis yang tertangani (Ha) | 48.53 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
|  |  | Peningkatan pengelolaan persampahan | Persentase penanganan persampahan % | 12.66 | 16.66 | 20.66 | 24.66 | 28.66 | 32.66 |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan. Denan demikian maka diharapkan akan terwujud kinerja yang optimal melalui proses yang sistematis dan terencana. Strategis dan arah kebijakan disusun berdasarkan factor internal dan eksternal, sehingga upaya-upaya yang dilakukan mampu meminimalisir berbagai permasalahan yang mungkin muncul.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes dalam 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 5.1.*

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VISI | MENUJU BREBES UNGGUL, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN | | |
| MISI 2 | Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan. | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup | Meningkatnya kualitas air | 1. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi terhadap kegiatan/usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan.  2. Meningkatkan sarana prasarana dan pemahaman masyarakat terhadap adaptasi mitigasi perubahan iklim dan konservasi sumber daya alam.  3. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.  4. Meningkatkan jumlah taman kota dan sarana prasarana pendukung pengelolaan RTH.  5. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | 1. Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup melakukan pemantauan dan pengawasan.  2. Mengendalikan pencemaran lingkungan dari sumber pencemaran.  3. Meningkatkan perlindungan kawasan konservasi sumber daya alam.  4. Meningkatkan upaya pengolahan sampah dari sumbernya.  5. Meningkatkan upaya penghijauan.  6. Membangun kesadaran dan peran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup.  7. Membangun kemitraan dengan lembaga lain dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan.  8. Meningkatkan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup.  9. Membangun sistem informasi lingkungan hidup yang berkualitas. |
| Meningkatnya kualitas udara |
| Meningkatnya tutupan lahan |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah terbagi dalam 2 (dua) periode yaitu periode Tahun 2017 – 2018 dan periode Tahun 2019 – 2022, yaitu :

**A. Program dan Kegiatan Tahun 2017 – 2018,**adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :
2. Penyediaan jasa surat menyurat
3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
12. Penyediaan makanan dan minuman
13. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14. Rapat – rapat koordinasi ke dalam daerah
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
17. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
18. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
19. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
20. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
21. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
22. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
23. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
24. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
25. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
26. Koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura
27. Pemantauan Kualitas Lingkungan
28. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
29. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
30. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
31. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan
32. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
33. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber – sumber air
34. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
35. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber – sumber air
36. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
37. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
38. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
39. Penataan RTH
40. Pemeliharaan RTH

**B. Program dan Kegiatan Tahun 2019 – 2022,**adalah :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13. Rapat – rapat koordinasi ke dalam daerah
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
16. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
18. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
19. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
21. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    * + 1. Pendidikan dan Pelatihan formal
22. Program Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkungan
23. Perencanaan dan kajian lingkungan hidup
24. Penaatan lingkungan hidup
25. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
26. Program Pengembangan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran
27. Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun
28. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah KabupatenBrebes yang direncanakan untuk Periode Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

*Tabel 6.1.*

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah**

**Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SampahKabupaten BrebesTahun 2017 – 2022**

| **Tujuan** | **Ind. Tujuan** | **Sasaran** | **Ind. Sasaran** | **Kode** | **Program** | **Ind. Program (Outcome)** | **Kegiatan** | **Ind. Kegiatan (Output)** | **Data Capaian (2017)** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah** | | **Unit Kerja PD** | **Lokasi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun 2018** | | | **Tahun 2019** | | | **Tahun 2020** | | **Tahun 2021** | | **Tahun 2022** | |
| **Target** | **Rp** | **Target** | | **Rp (000)** | **Target** | | **Rp (000)** | **Target** | **Rp (000)** | **Target** | **Rp (000)** | **Target** | **Rp (000)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| Meningkatnya kualitas air | Indeks Kualitas Air |  |  |  |  |  |  |  | 42.3 | 43.6 |  | 45 | |  | 46.3 | |  | 47.6 |  | 49 |  | 49 |  | **DLHPS** | **Kab. Brebes** |
| Meningkatnya kualitas udara | Indeks Kualitas Udara |  |  |  |  |  |  |  | 79.2 | 80.5 |  | 81.8 | |  | 83.1 | |  | 84.4 |  | 85.7 |  | 85.7 |  |  |  |
| Meningkatnya tutupan lahan | Indeks Kualitas Tutupan lahan |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 62 |  | 63 | |  | 65 | |  | 66 |  | 68 |  | 68 |  |  |  |
|  |  | Menurunnya pencemaran air | Persentase penurunan indikator pencemaran air (BOD, COD, TSS, TDS) (%) |  |  |  |  |  | 50 | 40 |  | 30 | |  | 20 | |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Menurunnya pencemaran udara | Persentase penurunan Hidro Carbon (HC) pada udara ambient (%) |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  | 60 | |  | 40 | |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Pengurangan lahan Kritis | Luas lahan kritis yang tertangani (Ha) |  |  |  |  |  | 48.53 | 40 |  | 30 | |  | 20 | |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Peningkatan pengelolaan persampahan | Persentase penanganan persampah (%) |  |  |  |  |  | 12.66 | 16.66 |  | 20.66 | |  | 24.66 | |  | 28.66 |  | 32.66 |  | **32.66** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Program Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkngan | Persentase aduan masyarakat yg di tindaklanjuti (%) |  |  | 100 | 100 |  | 100 | | 6,950,000 | 100 | | 9,350,000 | 100 | 11,350,000 | 100 | 14,550,000 | 100 | 42,200,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha) |  |  | 0 | 10 |  | 10 | |  | 10 | |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jenis Dokumen (IKPLHD) dan dokumen lingkungan lainnya (dokumen) |  |  |  | 1 | | 1,000,000 | 1 | | 1,250,000 | 1 | 1,500,000 | 1 | 1,750,000 | 4 | 5,500,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup (Rekomendasi) |  | 40 |  | 40 | | 100,000 | 40 | | 200,000 | 40 | 300,000 | 40 | 400,000 | 200 | 1,000,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Titik Sampling Kualitas Udara Ambient (titik sampling) |  |  |  | 5 | | 200,000 | 10 | | 300,000 | 12 | 400,000 | 15 | 500,000 | 42 | 1,400,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Sungai Kewenangan Kabupaten yang diuji kualitas airnya (sungai) |  |  |  | 5 | | 200,000 | 6 | | 300,000 | 7 | 400,000 | 8 | 500,000 | 8 | 1,400,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Penaatan Lingkungan Hidup | Persentse Penanganan Aduan Masalah Lingkungan Hidup (%) |  |  |  | 100 | | 200,000 | 100 | | 250,000 | 100 | 300,000 | 100 | 350,000 | 400 | 1,100,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berstatus TAAT dalam Penilaian PROPER (pelaku usaha) |  |  |  | 8 | | 250,000 | 10 | | 300,000 | 12 | 350,000 | 15 | 400,000 | 45 | 1,300,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Parameter Laboratorium Linkungan Hidup yg dikuasai (paramter) |  |  |  | 12 | | 1,000,000 | 15 | | 1,200,000 | 17 | 1,500,000 | 22 | 2,000,000 | 66 | 5,700,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Terkelola (lokasi) | 12 |  |  | 15 | | 2,000,000 | 25 | | 3,500,000 | 35 | 4,500,000 | 45 | 6,500,000 | 45 | 16,500,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Sekolah dengan status Sekolah Berbudaya Lingkungan /Sekolah Adhiwiyata (sekolah) |  |  |  | 10 | | 200,000 | 10 | | 250,000 | 10 | 300,000 | 10 | 350,000 | 40 | 1,100,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Pohon yang tertanam di daerah tangkapan air (pohon) |  |  |  | 60,000 | | 1,000,000 | 60,000 | | 1,000,000 | 60,000 | 1,000,000 | 60,000 | 1,000,000 | 240,000 | 4,000,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Pohon yang Tertanam d wilayah pesisir (pohon) |  |  |  | 20,000 | | 800,000 | 20,000 | | 800,000 | 20,000 | 800,000 | 20,000 | 800,000 | 80,000 | 3,200,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Program Pengembangan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran | Persentase Layanan Penanganan Persampahan Perkotaan(%) |  |  | 62.69 |  |  | 65.00 | | 33,850,000 | 70.00 | | 39,840,000 | 75.00 | 46,533,000 | 80.00 | 54,036,250 | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase Pengurangan Sampah Perdesaan (%) |  |  |  |  |  | 35 | |  | 40 | |  | 45 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Presentase Penurunan jumlah indikasi pelanggaran (%) |  |  |  |  |  | 10 | |  | 15 | |  | 20 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Presentase usaha /kegiatan yang memenuhi peraturan bidang LH (%) |  |  |  |  |  | 65 | |  | 70 | |  | 75 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Presentase Penanganan sampah wilayah Brebes |  |  |  |  |  |  | |  | 48,74 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Presentase Penanganan sampah wil. Ketanggungan |  |  |  |  |  |  | |  | 37,32 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Presentase Penanganan sampah wilayah Bumiayu |  |  |  |  |  |  | |  | 13,54 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) | Jumlah Bank Sampah yang Terbentuk (unit) |  |  |  | 180 | | 750,000 | 230 | | 1,000,000 | 280 | 1,250,000 | 330 | 1,500,000 | 330 | 4,500,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Volume Sampah yang Terangkut (m3) |  |  |  | 216,000 | | 30,000,000 | 226,800 | | 34,500,000 | 238,140 | 39,675,000 | 250,043 | 45,626,250 | 250,043 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Volume Sampah yang Terkelola (m3) |  |  |  | 56 | | 2,000,000 | 58.80 | | 3,000,000 | 61.74 | 4,000,000 | 64.83 | 5,000,000 | 65 | 14,000,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Ijin TPS Limbah B3 yang diterbitkan (ijin) |  |  |  | 10 | | 200,000 | 12 | | 250,000 | 14 | 300,000 | 16 | 350,000 | 52 | 1,100,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Usaha/Kegiatan yang di Bina dan Di Awasi (usaha/kegiatan) | 15 | 20 |  | 40 | | 350,000 | 48 | | 420,000 | 58 | 504,000 | 69 | 605,000 | 69 | 1,879,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang diterbitkan (ijin) | 12 | 17 |  | 22 | | 200,000 | 27 | | 250,000 | 32 | 300,000 | 37 | 350,000 | 37 | 1,100,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Usaha/Kegiatan yang di Bina dan Di Awasi (usaha/kegiatan) | 15 | 20 |  | 40 | | 350,000 | 48 | | 420,000 | 58 | 504,000 | 60 | 605,000 | 226 | 1,879,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | **Program Pelayanan Adm. Perkantoran** |  |  | Tingkat Kepuasan pelayanan adm. perkantorn di lingkungan kantor (%) |  |  |  | **100** | | **2,045,000** | **100** | | **2,315,000** | **100** | **2,610,000** | **100** | **2,880,000** | **100** | **9,850,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat | Jenis surat masuk trdistribusi |  |  |  | 1,000 | | 25,000 | 1,000 | | 30,000 | 1,000 | 35,000 | 1,000 | 40,000 | 4,000 | 130,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jenis surat keluar trdistribusi |  |  |  | 1,000 | |  | 1,000 | |  | 1,000 |  | 1,000 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan (jenis |  |  |  | 5 | | 275,000 | 5 | | 300,000 | 5 | 325,000 | 5 | 350,000 | 20 | 1,250,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah service peralatan dan perlengkapan kantor (kali) |  |  |  | 200 | | 125,000 | 225 | | 150,000 | 250 | 175,000 | 250 | 200,000 | 925 | 650,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa adm. keuangn | Jml tenaga adm. Keuangan (orang) |  |  |  | 11 | | 125,000 | 11 | | 150,000 | 11 | 175,000 | 11 | 200,000 | 44 | 650,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jenis peralatan kebersihan kantor tersedia (jenis) |  |  |  | 30 | | 125,000 | 35 | | 150,000 | 40 | 175,000 | 45 | 200,000 | 150 | 650,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Jenis alat tulis kantor tersedia (jenis) |  |  |  | 100 | | 150,000 | 100 | | 175,000 | 100 | 200,000 | 100 | 225,000 | 400 | 750,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jenis barang cetakan dan penggandan tersedia (jenis) |  |  |  | 20 | | 100,000 | 20 | | 125,000 | 20 | 150,000 | 20 | 175,000 | 80 | 550,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan komponeinstalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan tersedia (jenis) |  |  |  | 10 | | 60,000 | 15 | | 70,000 | 20 | 80,000 | 25 | 90,000 | 70 | 300,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jenis peralatan dan perlengkapan kantor tersedia (jenis) |  |  |  | 50 | | 225,000 | 50 | | 250,000 | 50 | 300,000 | 50 | 325,000 | 200 | 1,100,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU-an | Jenis bahan bacaan dan peraturan Per-Uuan tersedia (jenis) |  |  |  | 5 | | 60,000 | 5 | | 65,000 | 5 | 70,000 | 5 | 75,000 | 20 | 270,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Jenis makan minum tersedia (jenis) |  |  |  | 5 | | 175,000 | 5 | | 200,000 | 5 | 225,000 | 5 | 250,000 | 20 | 850,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah laporan perjalanan dalam daerah (lap) |  |  |  | 400 | | 325,000 | 425 | | 350,000 | 450 | 375,000 | 475 | 400,000 | 1,750 | 1,450,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Jumlah laporan perjalanan luar daerah (lap) |  |  |  | 600 | | 275,000 | 625 | | 300,000 | 650 | 325,000 | 675 | 350,000 | 2,550 | 1,250,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | Persentase Aset dalam kondisi baik (%) |  |  |  |  | **100** | | **600,000** | **100** | | **1,755,000** | **100** | **916,000** | **100** | **1,084,200** | 400 | **4,355,200** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Jml kendaraan dinas/operasional baru (unit) |  |  |  | 1 | | 150,000 | 1 | | 180,000 | 1 | 216,000 | 1 | 259,200 | 4 | 805,200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan Mebeleur | Jenis mebeleur baru (jenis) |  |  |  | 5 | | 100,000 | 5 | | 125,000 | 5 | 150,000 | 5 | 175,000 | 20 | 550,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jml gedung kantor dlm kondisi baik (unit) |  |  |  | 1 | | 150,000 | 1 | | 200,000 | 1 | 250,000 | 1 | 300,000 | 4 | 900,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jml kendaraan dinas/operasional dlm kondisi baik (unit) |  |  |  | 6 | | 200,000 | 7 | | 250,000 | 7 | 300,000 | 7 | 350,000 | 27 | 1,100,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jml bangunan gedung rusak menjadi baik (unit) |  |  |  |  | | 0 | 1 | | 1,000,000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1,000,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | **Program peningkatan disiplin aparatur** |  |  | Persentase kehadiran pegawai (%) |  |  |  | **100** | | **500,000** | **100** | | **600,000** | **100** | **700,000** | **100** | **800,000** | **400** | **2,600,000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jml pakaian khusus hari-hari tertentu (stel) |  |  |  | 350 | | 250,000 | 375 | | 300,000 | 400 | 350,000 | 425 | 400,000 | 1,550 | 1,300,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Olahraga | Jml pakaian olahraga (stel) |  |  |  | 350 | | 250,000 | 375 | | 300,000 | 400 | 350,000 | 425 | 400,000 | 1,550 | 1,300,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | **Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  |  | Persentase pegawai berpotensi (%) |  |  |  | **100** | | **50,000** | **100** | | **60,000** | **100** | **72,000** | **100** | **86,400** | **400** | **268,400** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pendidikan dan pelatihan formal | Jml pegawai mendapat sertifikat diklat (orang) |  |  |  | 5 | | 50,000 | 6 | | 60,000 | 6 | 72,000 | 7 | 86,400 | 24 | 268,400 |  |  |
|  |  |  |  |  | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** |  |  | Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%) |  |  |  | 100 | | 350,000 | 100 | | 450,000 | 100 | 550,000 | 100 | 650,000 | 400 | 2,000,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | Jenis dokumen (lakip, sakip, evaluasi rkpd) |  |  |  | 10 | | 100,000 | 10 | | 125,000 | 10 | 150,000 | 10 | 175,000 | 40 | 550,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jenis dokumen laporan akhir tahun (buah) |  |  |  | 1 | | 50,000 | 1 | | 75,000 | 1 | 100,000 | 1 | 125,000 | 4 | 350,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyusunan media publikasi dan promosi hasil capaian kinerja pembangunan | Jenis media publikasi dan promosi (pameran, karnaval) |  |  |  | 5 | | 200,000 | 5 | | 250,000 | 5 | 300,000 | 5 | 350,000 | 20 | 1,100,000 |  |  |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja perangkat daerah pada dasarnya dilaksanakan untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Brebes, yaitu:

* + - 1. Prosentase penanganan persampahan;
      2. Indeks kualitas air
      3. Indeks kualitas udara
      4. Meningkatnya tutupan lahan

Target yang ingin dicapai dari indikator-indikator tersebut disajikan dalam Tabel T-C.28. sebagai berikut :

*Tabel 7.1.*

**INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN**

**PENGELOLAAN SAMPAH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD** | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD** |
| Tahun  2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun  2022 | Tahun  2022 |
| 1 | Prosentase penanganan persampahan (%) | 12,66 | 16,66 | 20,66 | 24,66 | 28,66 | 32,66 | 32,66 |
| 2 | Indeks Kualitas Air | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 65 | 65 |
| 3 | Indeks Kualitas Udara | 80 | 82 | 85 | 86 | 90 | 92 | 92 |
| 4 | Meningkatnya tutupan lahan | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 68 |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra DLHPS Tahun 2017 – 2022 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes di bidang Lingkungan Hidup dan pengelolaan sampah.

Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Karena itu, dibutuhkan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes dan stakeholders. Perencanaan yang baik dan sistematis, pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, serta didukung oleh sarana prasarana juga anggaran yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes sebagai Instansi yang kredibel dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanganan persampahan di Kabupaten Brebes.

Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang–undangan, dan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Renstra maka akan dilakukan penyesuaian. Semoga Renstra ini dapat menjadi instrumen kunci dalam perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes selama 5 tahun periode mendatang.